

Abubakar Eby Hara, Ph.D.

Pengantar

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI

Dari Realisme sampai Konstruktivisme

Digital Repository Universitas Jember

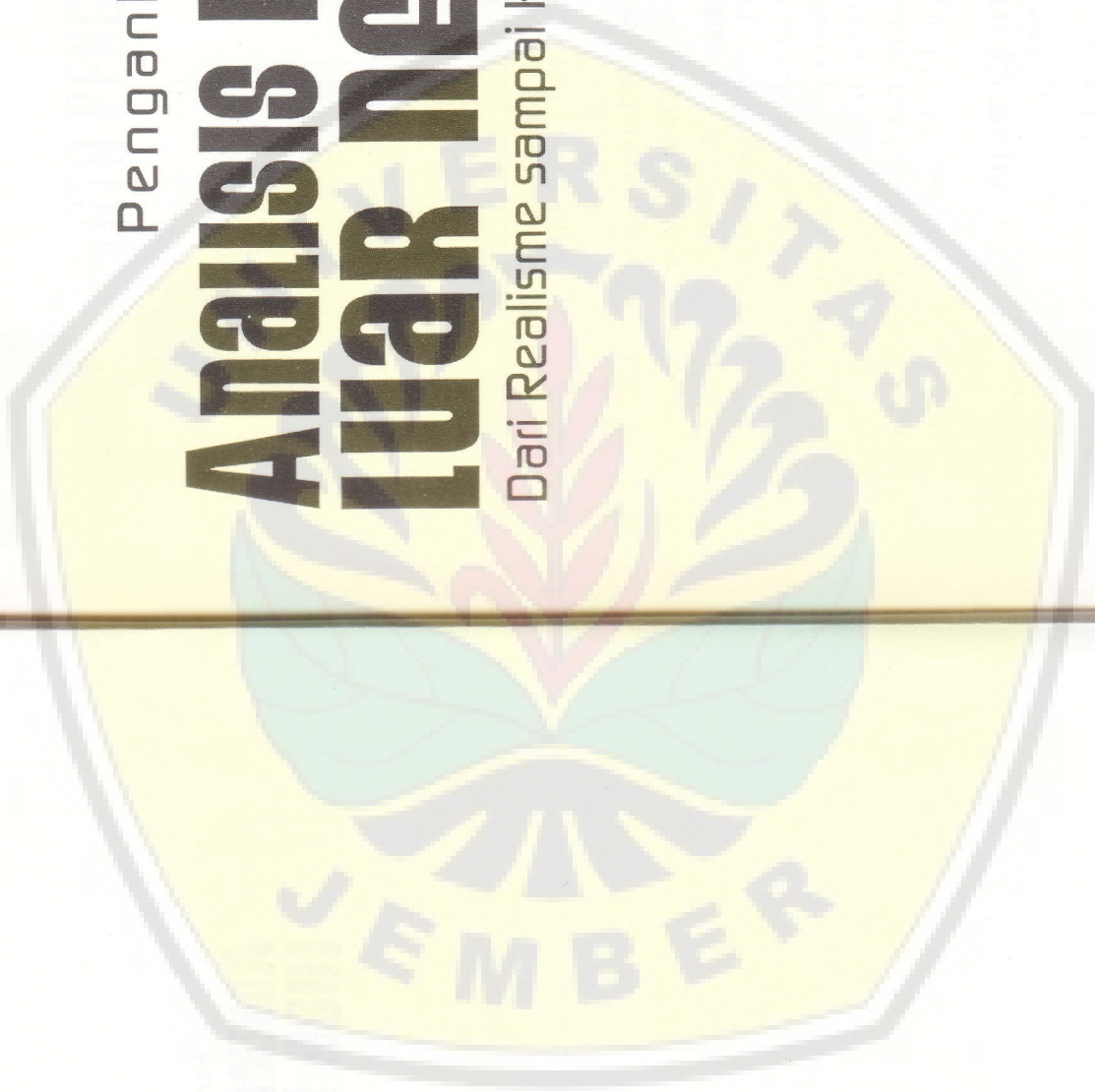


Abubakar Eby Hara, Ph.D.

Pengantar

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI

Dari Realisme sampai Konstruktivisme



nuansa

KATA PENGANTAR

Kode Penerbitan: PN-643-02-11

Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme
Abu Bakar Eby Hara, Ph.D.

Editor: Muthori A Elwa, Irwan Kurniawan
Pembaca prof: Tim Nuansa

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, April 2011

Diterbitkan oleh:

Penerbit NUANSA

Komplek Sukup Baru No. 23
Ujungberung - Bandung 40619

Telp: 022-76883000, 92293000, Fax: 022-7801410

E-mail: nuansa.cendekia@gmail.com

Layanan SMS: 0818638038

Anggota IKAPI

Desain cover: Tatang Rukyot

Tata Letak: Tank_tea

ISBN: 978-602-8394-43-7

Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengikuti tekanan publik dalam politik luar negeri terhadap Malaysia? Publik begitu marah dan emosi melihat para aktor dan pemerintah mengambil keputusan politik luar negeri Indonesia begitu lemah dan tak bergigi terhadap Malaysia. Mereka seolah takut dengan Malaysia yang di mata publik jelas-jelas menginjak-injak dan menghina kedaulatan dan martabat bangsa. Sudah banyak sekali, menurut masyarakat, warga Indonesia disiksa, diperlakukan tidak wajar, demikian juga sudah sekian kali perbatasan Indonesia dilanggar oleh Malaysia. Bahkan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan pun raib diambil Malaysia. Belum lagi perairan Ambalat, kini terus dalam incaran Malaysia.

Persoalan ini nampaknya sederhana. Bagi masyarakat, Indonesia adalah negara yang punya kedaulatan penuh, negara besar dan punya pengaruh, sehingga tidak sulit untuk 'memberi pelajaran' dan bertindak tegas terhadap Malaysia. Tapi bagi pemerintah agaknya persoalannya tidak sederhana. Banyak pertimbangan yang harus mereka pikirkan mulai dari hubungan bilateral sampai dengan hubungan dalam konteks ASEAN. Kesalahan 'meng-

ambil keputusan bagi pemerintah bukan saja berakibat fatal dalam hubungan Indonesia-Malaysia tetapi juga bisa mengancam kestabilan kawasan Asia Tenggara yang telah dibangun sejak lama.

Bagaimana kita memahami dan menjelaskan hal ini, itu merupakan suatu kajian dalam studi hubungan internasional, khususnya kajian analisis politik luar negeri yang menarik. Banyak alternatif penjelasan yang bisa dilakukan, mulai dari pendekatan realisme yang memang mengharuskan Indonesia bersikap dan berlaku tegas dalam diplomasi terhadap Malaysia. Sampai pada penjelasan konstruktivisme yang sekadar dilakukan untuk memahami apa yang dilakukan oleh Indonesia dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya dalam diplomasi terhadap Malaysia. Dalam konteks liberalisme, politik luar negeri terhadap Malaysia itu bisa diletakkan dalam suatu *nexus* kerjasama ekonomi dan politik dalam ASEAN yang makin kompleks.

Buku ini mencoba memberi panduan bagi para peminat politik luar negeri, tidak hanya mahasiswa dan akademisi, tetapi juga khalayak ramai yang makin sensitif terhadap setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Masyarakat kini makin sadar dan peka terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Selain terhadap Malaysia, kebijakan yang lebih pro-Barat, terlalu lunak pada Israel yang terus menindas rakyat Palestina, yang tidak peka terhadap aspirasi mayoritas masyarakat, akan mendapatkan protes di masyarakat. Masyarakat dengan kata lain melakukan deliberasi atau perdebatan tidak hanya pada isu-isu politik domestik tetapi juga isu internasional di mana Indonesia terlibat.

Selain untuk memahami situasi, memberi penjelasan terhadap *puzzle* yang muncul dalam berbagai kebijakan luar negeri, buku ini juga bermaksud memberi preskripsi, membuka jalan bagi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dan masalah luar negeri. Teori dan dasar analisis yang ditawarkan juga dimaksudkan untuk memudahkan kita memahami bahkan memprediksi kebijakan dan keputusan politik luar negeri negara lain.

Untuk memudahkan pembaca, uraian-uraian dalam buku ini dibuat dengan cukup sederhana dengan memilah berdasarkan

paradigma atau perspektif dominan dalam politik luar negeri yang ada selama ini. Perkembangan berbagai perspektif politik luar negeri ini termasuk sangat progresif dengan diperkenalkannya berbagai paradigma baru seperti teori kritis dan konstruktivis. Perkembangan ini adalah juga mengikuti perkembangan perubahan dunia setelah berakhirnya perang dingin. Sebagian pihak melihat dunia semakin damai setelah berakhir perang dingin, sementara pihak yang lain melihat adanya ancaman konflik yang makin besar.

Perdebatan paradigmatik itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang sangat menarik karena asumsi-asumsi tentang peran Negara yang dominan dalam analisis politik luar negeri dewasa ini digugat oleh pendekatan lain seperti liberalisme, analisis politik luar negeri, konstruktivisme sampai pada masalah etik dalam politik luar negeri. Diperkenalkannya berbagai perspektif ini diharapkan akan memperkaya wawasan dan cara kita untuk menganalisis dan memahami keputusan politik luar negeri dan bagaimana kita dapat berperanan dalam proses itu.

Buku yang hadir di depan Anda ini adalah buah karya hasil kajian yang cukup lama karena prosesnya berjalan bersama waktu penulis memberi kuliah-kuliah di berbagai universitas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tepatnya ketertarikan penulis pada Analisis dan Teori Politik Luar Negeri dimulai semenjak tahun 1991, dua tahun setelah penulis memulai karir sebagai dosen. Pada tahun itu, artikel penulis tentang *Decision-Making Theories* dalam Politik Luar Negeri muncul dalam *Jurnal Ilmu Politik*, satu-satunya jurnal Ilmu Politik pada saat itu.

Penulis beruntung sejak tahun itu sampai sekarang, pengetahuan penulis terus diasah dengan berbagai bacaan dan perdebatan dengan mahasiswa dan kolega di universitas dan di berbagai tempat seminar. Banyak sekali yang telah berubah dalam kajian politik luar negeri. Dulu orang hanya mengenal analisis faktor-faktor dalam negeri untuk menjelaskan keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara. Sekarang faktor itu sangat kompleks, tidak terbatas pada aktor dalam negeri seperti pemerintah dan partai-partai tetapi berbagai aktor non-negara di dalam maupun di luar negeri.

Karena itulah penulis berutang budi kepada banyak orang yang, baik secara langsung maupun tidak, telah mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini. *Alhamdulillah*, dengan bantuan mereka dan dengan rahmat yang diberikan oleh Yang Mahakuasa, buku ini bisa diselesaikan juga. Pertama kali, tentu saja penulis berterimakasih kepada para mahasiswa dan kolega, baik di Universitas Jember maupun di tempat lain yang selalu bertanya dan mendebat berbagai pandangan penulis. Mereka juga selalu mendorong penulis untuk melahirkan buku-buku yang mudah mereka pahami, tidak terlalu abstrak tapi membumi sehingga bisa membantu mereka menganalisis masalah-masalah luar negeri. Ketika penulis melahirkan buku pertama, *Pengantar Ilmu Politik*, mereka selalu bertanya, kenapa tidak dari dulu membuat hidup mereka menjadi lebih mudah.

Penulis juga berterimakasih kepada keluarga penulis, istri Yuyun Rahim dan anak-anak Fabrobi Fazlur Ridha, Fabsya Farazahra dan Fabasyari Faustari Hara yang selalu heran melihat ayah mereka duduk terpaku di belakang komputer dan bertanya-tanya kapan pergi ke luar makan dan tamasya bersama ke pantai pasir putih Malikan. Terimakasih atas waktu dan kesabaran mereka. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada teman dekat tapi jauh di Australia, saudara Grayson J. Llyod yang selalu mendorong tulisan hasil karya saya.

Tentu saja akhirnya *last but not least*, tidak lupa berterimakasih kepada Sdr Nurani Soyomukti, partner diskusi, partner kerja dan partner suka-duka yang selalu mendorong bahkan membantu langsung mengedit tulisan-tulisan saya agar lebih layak baca. Maluklumlah Nurani adalah penulis produktif dan berpengalaman. Dengan bantuan beliau, bahasa buku ini lebih mudah dan proses penerbitan buku ini menjadi lebih cepat dan lancar. Semoga buku ini dapat memperkaya kajian hubungan internasional di Indonesia.

Jember, 16 Nopember 2010
10 Dzulhijjah 1431

Abubakar Eby Hara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — 5

I PENDAHULUAN — 13

1. Beberapa Terminologi APLN — 15
2. Perdebatan Metodologi dalam HI dan APLN — 17
3. Kritik terhadap “*Unitary State Actor*” — 23
4. Kemunculan APLN: Tiga Generasi — 26
5. Pembagian Bab — 31

II POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN REALISME — 34

1. Asumsi-asumsi Utama Realisme — 35
2. Realisme Klasik dan PLN — 39
3. Neo-Realisme dan PLN — 43
4. Contoh Kasus Hubungan Indonesia-Malaysia — 54

III ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI DALAM PAN-DANGAN LIBERALISME — 60

1. Prinsip Dasar Liberalisme — 61
2. Liberalisme dan PLN — 65
3. Kasus Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Liberalisme — 72

IV ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI PER-TAMA — 79

1. Faktor-faktor Lingkungan dalam APLN — 80
2. Teori Internal-Eksternal Setting dari Snyder, Bruck dan Sapin — 84
3. Pre-Teori dan Teori Politik Luar Negeri dari Rosenau — 89
4. Model-model Pembuatan Keputusan Graham T. Allison — 91
5. Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Pandangan APLN Generasi Pertama — 100

V ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI KE-DUA — 104

1. Kelanjutan Konsep Pengaruh Lingkungan, Idiosinkretik dan Sistem Kepercayaan — 105
2. Kelanjutan Model Peranan Organisasi dan Birokrasi — 107
3. Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Pandangan APLN Ge-nerasi II — 111

VI KONSTRUKTIVISME DAN GENERASI KETIGA APLN — 114

1. Pengertian dasar Konstruktivisme — 116
2. Macam-macam Aliran Konstruktivis — 122
3. Perkembangan Konstruktivis dan APLN — 137

4. Beberapa Contoh Kasus APLN Konstruktivis — 144
5. Hubungan Malaysia dan Indonesia dari Perspektif Konstruktivis — 151

4. Kesimpulan: Basis Hubungan Baru — 173

VII ETIK DAN POLITIK LUAR NEGERI — 177

1. Makna Perspektif Etik dalam HI — 179
2. PLN Etik Sebagai Tujuan dan Sarana — 188
3. Dunia yang Lebih Damai: Ke Arah PLN yang Etik? — 197
4. Etik dalam Hubungan Indonesia-Malaysia — 200
5. Kesimpulan: Menuju Etik Hubungan Kosmopolitanisme? — 209

VIII KESIMPULAN: MEMILIH DI ANTARA BERBAGAI PENDEKATAN — 214

1. Langkah Awal Memilih Pendekatan — 215
2. Memastikan Pilihan Kerangka Teoritik — 217

DAFTAR PUSTAKA — 223

Indeks — 233
Tentang Penulis — 241

BAB I

PENDAHULUAN

Sulit membuat definisi yang lengkap tentang politik luar negeri. Tetapi secara umum, bisa dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik Luar Negeri (selanjutnya disingkat PLN) menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. PLN itu bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (K. J. Holsti, 1983: 97).

Seperti Holsti, definisi yang luas diberikan oleh Christopher Hill yang mengatakan PLN sebagai 'jumlah hubungan luar resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara) dalam hubungan internasional' (Hill, 2003: 3). Definisi yang dianggap klasik dan detail diberikan oleh Walter Carlsnaes, yaitu 'tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non-pemerintah) yang berada luar di wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen

BAB II POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN REALISME

Walaupun demikian, sekecil apa pun peran negara-negara, mereka tetap melakukan dan memutuskan suatu kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Karena itu, kita tetap perlu membahas pilihan-pilihan negara itu walau terbatas pada menu yang memang sudah disediakan dan semacam sudah tertulis dalam struktur internasional. Dalam bab ini, kita mengkaji asumsi-asumsi dasar realisme dalam rangka membandingkannya nanti dengan APLN yang muncul sebagai kritik terhadap realisme. Realisme juga merupakan suatu perspektif yang tidak seragam. Terdapat dua *mainstream* utama dalam realisme yang mempengaruhi pandangan mereka tentang PLN. Aliran pertama sering disebut realisme klasik dan yang kedua disebut neo-realisme. Bab ini pertama akan membahas gambaran umum realisme, kemudian akan dijelaskan pandangan realisme klasik terhadap politik luar negeri. Setelah itu, akan dibincangkan pandangan neo-realis terhadap PLN.

I. ASUMSI-ASUMSI UTAMA REALISME

Ada tiga asumsi utama realisme yang sering dikelompokkan dalam 3S: *statism, survival, self-helps* (Dunne and Schmidt, 2001: 155-56). *State* adalah aktor utama dalam HI yang anarkis. Asumsi ini berasal dari kenyataan bahwa untuk *survive* dan mencapai level subsisten manusia perlu hidup bersatu berdasarkan suatu solidaritas kelompok. Kohesi dalam grup ini juga berpotensi untuk berkonflik dengan kelompok-kelompok lain. *State* merupakan pengelompokan manusia (*groupism*) yang paling penting dewasa ini, dan sumber kohesi *in-group* yang paling kuat adalah nasionalisme (Wohlforth, 2008: 32).

Sementara itu, aktor-aktor yang lain dinilai kurang penting. Negara sebagai satu komunitas politik yang independen mempunyai kedaulatan terhadap suatu wilayah dalam dunia yang anarkis. Perlu dijelaskan bahwa anarki bagi realis bukan keadaan benar-benar *chaos* dan tidak ada aturan, tetapi ketiadaan kekuasaan sentral. Berbeda dengan struktur organisasi dalam politik domestik yang hirarkis, dalam hubungan internasional, struktur dasarnya adalah anarkis di

Sebelum membahas APLN lebih lanjut, ada baiknya dibahas terlebih dahulu secara agak detail bagaimana pandangan realisme tentang politik luar negeri. Orang mungkin akan mempertanyakan apakah ada TPLN dari kalangan realis karena fokus realisme sebetulnya lebih kepada hakikat *power* dan struktur politik internasional yang bersifat anarkis dan bagi kalangan neo-realis sistem politik internasional ini menentukan perilaku negara-negara. Para realis memperlakukan *state* sebagai aktor yang rasional yaitu mengikuti prinsip mengejar, melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya yang didefinisikan sebagai kekuasaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya di dunia internasional. Disebut sesuai dengan kemampuannya, karena perilaku *state* dipengaruhi oleh keseluruhan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, yang memiliki skop dan aturan-aturannya sendiri (Holsti, 1983: 97). Berdasarkan hal ini, tidak perlu ada analisis tentang PLN negara-negara itu karena ia otomatis sudah dijelaskan oleh asumsi *power* dan juga anarki dalam dunia internasional, atau dengan kata lain, negara tidak punya pilihan dalam menentukan PLN.

BAB III

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN LIBERALISME

bergerak ke arah dua sistem ideologi lain seperti komunisme dan otoritarianisme. Tesis ini diikuti pula dengan asumsi supremasi sistem demokrasi dalam kaitan dengan perang. Tesis *democratic peace* menyebutkan bahwa sesama negara demokratis tidak terjadi perang.

Dalam bab ini akan diuraikan apa itu liberalisme dan sejauh mana ia memang memberikan pengaruh yang cukup berkesan terhadap PLN suatu negara. Pada bagian pertama akan dijelaskan apa itu liberalisme. Kemudian bagian kedua akan ditinjau sejauh mana liberalisme dapat menjelaskan PLN suatu negara.

I. PRINSIP DASAR LIBERALISME

Liberalisme merupakan ideologi yang mempunyai pengaruh besar di dunia dan yang dibincangkan di sini berasal dari pemikiran Barat. Ia menjadi landasan bagi demokrasi dan sistem kapitalisme industri yang kini berkembang di dunia. Prinsip-prinsip pemikiran rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur tangan negara dianggap sesuai dengan sistem demokrasi dan kapitalisme. Kebebasan politik, kompetisi individu dalam masyarakat sipil dan sistem kapitalisme pasar adalah yang terbaik dalam menopang kesejahteraan melalui alokasi sumber-sumber yang terbatas secara efisien di masyarakat (Burchill, 2009: 3).

Ada tiga macam komitmen terhadap hak-hak yang menjadi fondasi liberalisme (M. W. Doyle, 2008: 50). Yang pertama disebut 'kebebasan negatif' yang merupakan kebebasan dari penguasa sewenang-wenang (*arbitrary*). Ini meliputi kebebasan menentukan yang baik dan buruk, kebebasan pers dan kebebasan berbicara, kesederajatan hukum, kebebasan memiliki dan hak milik. Yang kedua adalah hak untuk melindungi dan memperjuangkan kesempatan bagi kebebasan atau disebut juga 'kebebasan positif'. Ini meliputi hak sosial dan ekonomi, kesamaan kesempatan dalam pendidikan dan hak-hak terhadap sistem kesehatan dan mendapat pekerjaan. Hak-hak ini penting untuk bisa mengekspresikan diri

Liberalisme dalam hubungan internasional kembali mendapatkan perhatian besar setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989. Baik pengamat maupun para pembuat keputusan melihat adanya kesempatan bagi politik luar negeri yang lebih bersahabat dari negara-negara di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Harapan itu dicerminkan dari fokus kebijakan luar negeri Amerika yang lebih memperhatikan masalah-masalah penyelesaian HAM dan demokrasi. Tema-tema tentang idealisme, seperti *collective security* dan harapan bagi dunia yang damai lewat demokrasi muncul kembali. Bersatunya negara-negara di bawah PBB untuk melawan invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990 memberikan harapan tentang optimisme ini dan membuktikan bahwa negara-negara tidak mentolelir intervensi terhadap negara lain sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB.

Para pengamat juga memberikan perhatian lebih kepada liberalisme. Tesis yang paling menarik adalah dari Francis Fukuyama (Fukuyama, 2006) yang mengatakan bahwa sejarah dunia telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal dan kapitalisme. Ia mengatakan bahwa semua negara dalam satu dan lain hal



BAB IV

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI PERTAMA

di tengah arus nasionalisme anti-Malaysia yang kuat. Kelompok ini antara lain diwakili oleh NU (Nahdatul Ulama), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menegaskan bahwa hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia adalah terlalu kuat untuk dirusakkan oleh kepentingan ego individu. Mereka paham bahwa kalau terjadi konflik, yang rugi tentu rakyat di kedua negara. Dalam sebuah laporan kantor berita Malaysia, *Bernama*, ketua Dewan Syura NU Pusat, Masdar Farid Mas'udi mengatakan, "Kalau berlaku konflik, yang akan rugi kita sendiri. Orang lain atau pihak-pihak yang tidak suka dengan persaudaraan kita akan mengambil manfaat dari itu." Ia melanjutkan, "Walaupun pihak-pihak berkenaan itu pada awalnya tak mempunyai niat sedemikian, namun jika Indonesia dan Malaysia menjadi lemah, mereka akan ambil manfaatnya," katanya kepada *Bernama* di Jakarta.

Laporan-laporan media ini sering dangkal, perspektif laporan seringkali sepihak. Seolah-olah apa yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia lebih buruk daripada bencana tsunami dan bagaikan Indonesia sudah ditawan musuh. Sebenarnya, terlalu banyak persoalan di balik isu menyangkut anti-Malaysia. Siapa yang menjadi dalang, siapa yang merancang dan apa motif mereka adalah bermacam-macam.

Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa para analis liberal memandang hubungan Indonesia-Malaysia pada dasarnya bisa dilakukan dengan baik dan penuh harmoni. Tetapi dalam perjalanannya, banyak masalah yang timbul karena hubungan melibatkan berbagai pihak, kelompok dan kepentingan di dalam negeri. Mereka melihat ini sebagai bagian dari *social ill* yang mesti diatasi agar hubungan kedua negara dapat berjalan dengan baik. Dalam pandangan mereka juga, masih banyak hal lain dan saling ketergantungan di antara kedua negara yang dapat mencegah menguatnya sikap anti dan benci terhadap satu sama lain.[]

PLN berkembang sejak 1950-an dan menurut Hudson (Hudson, 2008: 11-29), ia mempunyai tiga tema utama. *Pertama*, analisis yang memfokuskan pada pembuatan keputusan PLN yang diinspirasi oleh tulisan Snyder, Bruck dan Sapin pada tahun 1950-an, kemudian dipengaruhi oleh tulisan tentang politik birokrasi dan organisasi pada tahun 1960-an-1970-an yang dapat kita temui pada tulisan-tulisan Allison dan Halperin. *Kedua*, analisis yang memfokuskan pada dimensi psikologi analisis PLN yang dipengaruhi oleh tulisan Kenneth Boulding, dan Harold dan Margaret Sprout pada tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan oleh Alexander George dan Michael Brecher pada 1960-an dan Irving Janis pada 1970-an. *Ketiga*, ada perkembangan PLN perbandingan yang dipengaruhi oleh tulisan Jim Rosenau pada tahun 1960-an. Rosenau memelopori upaya untuk membangun teori level menengah (*middle-range theory*), yaitu teori yang tidak berupaya menjelaskan semua PLN secara umum tetapi hanya PLN beberapa jenis negara atau PLN dalam situasi khusus seperti semasa krisis.

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI KEDUA

pengaruh lingkungan pada politik luar negeri, yang juga bisa dikaitkan dengan pengembangan kajian Rosenau dengan penekanan pada variabel individual dan kognitif, dan *kedua*, berbagai pengembangan model organisasi dan birokratik pembuatan keputusan. Namun, harus diingat bahwa pembagian itu tidak kaku karena mereka bersinggungan satu dengan yang lain. Faktor kognitif, misalnya, yang banyak dikembangkan dalam generasi kedua berkaitan baik dengan faktor lingkungan yang dipahami oleh Sprout maupun faktor psikologi dari individu dan kelompok seperti yang dimaksudkan oleh Rosenau. Pembagian ini hanya sekadar untuk memudahkan karena dalam analisisnya, generasi kedua sering mencoba menggabungkan atau mengambil bagian-bagian dari tiga arus utama pemikiran, teori dan model APLN ini.

1. KELANJUTAN KONSEP PENGARUH LINGKUNGAN, IDIOSINKRETIK DAN SISTEM KEPERCAYAAN

Seperti dikatakan Sprout, faktor lingkungan bisa berupa nilai-nilai di masyarakat, karakter nasional, budaya politik dan tradisi sejarah sebuah bangsa; bisa juga ciri-ciri struktural suatu bangsa, seperti tingkat industrialisasi dan bentuk pemerintahan, dan juga isu-isu mutakhir pada saat itu. Semua atau sebagian faktor ini mempengaruhi pikiran para pembuat keputusan PLN. Semua faktor ini, menurut Sprout, menjadi penting dan bisa mempunyai pengaruh sepanjang menjadi perhatian para pembuat keputusan. Dalam kaitan ini, menjadi sangat penting mengkaji apa yang disebut Sprout sebagai lingkungan psikologis para pembuat keputusan yang berupa persepsi, interpretasi, nilai-nilai, emosi, sikap, sistem kepercayaan dan bahkan sikap personal idiosinkrasi yang disebut oleh Rosenau yang ada pada individu atau aktor-aktor utama pembuat keputusan.

Beberapa konsep psikologis berhasil dikembangkan lebih lanjut oleh generasi kedua ini dalam kaitan dengan sikap personaliti

APLN generasi kedua merupakan kelanjutan dari teori-teori yang sudah dirintis oleh para pendahulu mereka di generasi pertama. Mereka melakukan beberapa modifikasi dan penyempurnaan terhadap model, konsep dan teori sebelumnya dan juga menerapkan model-model yang dimodifikasi ini dalam menjelaskan kasus-kasus. Satu hal yang membedakan generasi kedua dengan generasi pertama adalah generasi baru ini menekankan pada upaya menemukan teori-teori positifistik dan saintifik seperti yang diinginkan oleh Rosenau dengan membandingkan faktor yang paling berpengaruh dalam perumusan politik luar negeri beberapa negara. Karena itu pula pendekatan generasi pertama ini sering disebut *Comparative Foreign Policy* (CFP). Mereka ingin mengembangkan *middle range theories* yang dapat menjelaskan kasus-kasus politik luar negeri di berbagai atau lintas negara dan dalam waktu yang berbeda.

Perkembangan analisis pada generasi kedua ini secara umum masih mengikuti teori-teori dan model-model yang telah dirintis oleh para analis di generasi pertama. Kajian mereka dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu *pertama*, pengembangan

KONSTRUKTIVISME DAN GENERASI KETIGA APLN

Seper ti diuraikan dalam bab-bab awal, APLN berusaha memahami kebijakan LN melalui bagaimana para aktor, baik secara individual maupun kelompok, membuat keputusan. Dalam membuat keputusan PLN, menurut generasi pertama, pengkaji dan teoritisi PLN, para aktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Secara lebih spesifik, Sprout menyebut faktor itu sebagai lingkungan psikologis (berupa sikap dan kepribadian) dan lingkungan operasional (tempat beroperasinya keputusan di negara-negara target) yang ada di sekitar aktor-aktor. Menurut analisis PLN generasi pertama ini, yang paling penting adalah bagaimana para aktor itu memahami, mempersepsikan dan menginterpretasikan faktor-faktor di sekelilingnya untuk kemudian mengambil keputusan PLN.

Generasi kedua melanjutkan upaya-upaya generasi pertama ini dengan melakukan berbagai penelitian menggunakan kasus-kasus pembuatan keputusan PLN di berbagai negara. Dalam menjelaskan peran para aktor dalam membuat keputusan, mereka mencoba melihat cara aktor memahami permasalahan dan menganalisis sifat kognitif yang ada pada para aktor. Beberapa penulis melihat

faktor lain seperti yang ada dalam daftar Rosenau (individu, sumber-sumber sosial di dalam negeri dan faktor internasional seperti ketergantungan pada negara lain). Kemudian mereka juga menjelaskan dinamika yang terjadi pada unit-unit pembuat keputusan apakah unit individu, kelompok kecil atau banyak aktor otonom yang membuat satu kelompok.

Sulit sebenarnya untuk membedakan secara pasti tiap generasi ini. Tiap generasi seperti dikatakan di muka merupakan kelanjutan dari generasi berikutnya dan argumen mereka seringkali tumpang tindih. Perbedaannya terutama hanya pada upaya penyempurnaan teoritik dan pengayaan kajian serta keterbukaan mereka terhadap pengaruh ilmu lain seperti psikologi, statistik dan sejarah.

Generasi ketiga yang dibicarakan di sini juga merupakan kelanjutan dari generasi kedua. Perbedaan utama dengan generasi kedua barangkali adalah dalam hal metodologi untuk memahami para aktor dalam membuat keputusan. Sprout mengatakan bahwa penting untuk memahami bagaimana para aktor menginterpretasi dan mempersepsikan lingkungannya atau menyeleksi faktor lingkungan mana yang penting. Generasi ketiga seperti yang diwakili oleh konstruktivisme memberikan cara yang lebih konkrit untuk memahami bagaimana para aktor ini sampai pada satu persepsi tentang lingkungan, mempunyai sikap dan pada akhirnya memiliki identitas tertentu dalam kaitan dengan suatu isu. Mereka menekankan identitas yang biasanya muncul setelah terbentuknya pemahaman bersama atau *intersubjective understanding* dalam hal isu-isu yang dihadapi. Identitas inilah yang paling penting untuk diketahui oleh sebagian besar konstruktivis karena ia merupakan sumber-idea bagi diambilnya berbagai keputusan PLN.

Bab ini secara khusus mencoba memahami konstruktivisme sosial (akan disebut konstruktivisme saja) dan APLN. Pertama, akan diuraikan pengertian-pengertian dasar konstruktivisme. Setelah itu, hubungan antara konstruktivisme dan APLN, dan bagian akhir adalah beberapa penerapan konstruktivisme dalam beberapa kasus PLN.

3. Kedua negara sepakat untuk membentuk tim pakar dari kedua negara dalam mengkaji dan menyelesaikan masalah Ambalat dan sepakat akan apa pun keputusan yang dibuat oleh tim itu (Kompas, 19 Mei 2008).•

BAB VII ETIK DAN POLITIK LUAR NEGERI

Dewasa ini, pembicaraan PLN tidak bisa dipisahkan dengan masalah *ethics*. Memang benar, dalam banyak buku PLN yang diajarkan di berbagai universitas, persoalan etik dianggap tidak penting karena sering diasumsikan bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara. Negara dikatakan harus memaksimalkan kepentingan nasionalnya, sedangkan etik menunjukkan kelemahan suatu negara karena mau berkompromi dalam berhubungan dengan negara lain.

Pandangan demikian tentu saja tidak terlepas dari dominasi realisme dalam PLN selama ini. Dalam asumsi realisme, negara adalah berdaulat dan selalu mengejar kepentingan nasionalnya, termasuk, kalau perlu, dengan merugikan negara lain. Kepentingan moralitas atau etik adalah nomor dua karena yang paling penting adalah kepentingan yang didefinisikan dengan kepentingan untuk *survive* dari ancaman negara lain.

Subordinasi moralitas terhadap kekuasaan ini sering dipandang sebagai fakta dalam kehidupan politik internasional. Kebanyakan orang akan setuju dengan pernyataan Morgenthau bahwa 'tindakan negara-negara ditentukan bukan oleh prinsip-prinsip moral dan

signifikan. Dengan kata lain, pembicaraan tentang penggunaan teori dan analisis PLN tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang metodologi dan metode penelitian politik luar negeri.

Untuk tujuan itu, bab ini pertama akan membahas asumsi tiap-tiap pendekatan satu per satu disertai pembahasan tentang posisi bab-bab di atas dalam pendekatan metodologi. Terakhir, juga akan dibicarakan metode penelitian dan penulisan PLN dengan menggunakan contoh kasus.

I. LANGKAH AWAL MEMILIH PENDEKATAN

Dalam sub-bab ini, dibicarakan bagaimana sebaiknya kita memilih pendekatan sebelum melakukan penelitian tentang PLN suatu negara. Secara sederhana, dibahas di sini ihwal kapan kita bisa menggunakan realisme, idealisme dan pendekatan-pendekatan lain yang telah diuraikan dalam bab-bab buku ini untuk menganalisis PLN suatu negara.

Salah satu kesulitan dalam melakukan analisis PLN adalah dominasi realisme dan konsep *power* yang digunakannya. Para mahasiswa dan pengkaji PLN biasanya mencari jalan yang mudah dan simpel dalam menganalisis PLN. Realisme biasanya menjadi pilihan mereka, karena dalam pendekatan realisme terdapat konsep-konsep *power* dan kepentingan nasional yang sangat fleksibel. Banyak kasus atau hampir semua kasus bisa dijelaskan atau dikaitkan dengan *power* dan kepentingan nasional. Bahkan, bantuan kemanusiaan terhadap korban tsunami pun bisa dijelaskan atau dikaitkan dengan peningkatan *power* dan pengaruh dari negara yang memberi bantuan. Tetapi kalau semua bisa dijelaskan oleh realisme, apa fungsi pendekatan-pendekatan lain yang dikaji di sini? Apakah pendekatan yang lain tidak usah dihiraukan?

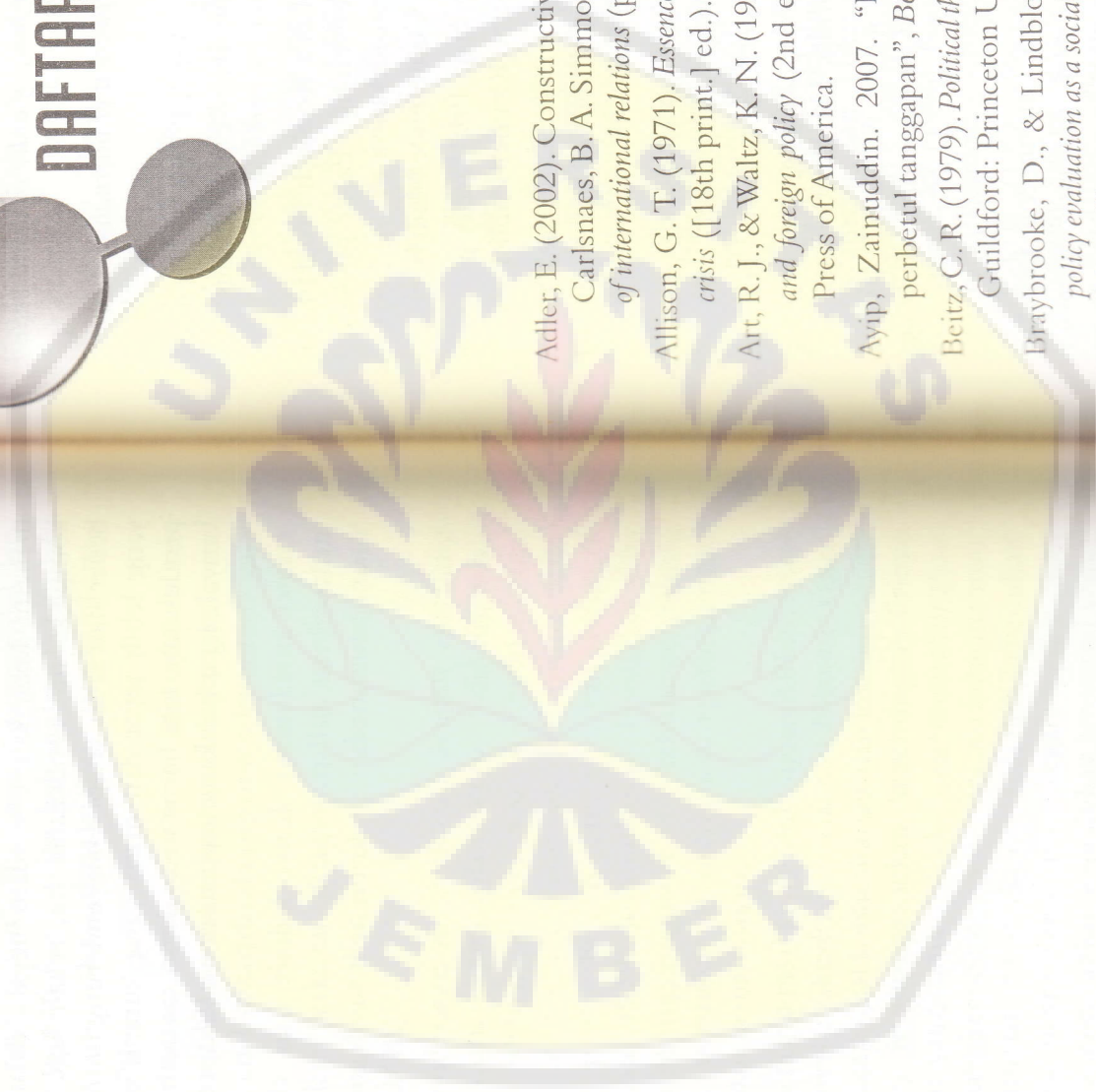
Jawaban terhadap persoalan di atas sebenarnya bukanlah bahwa Anda harus memilih realisme atau yang lain, tetapi adalah tentang memilih penjelasan dari perspektif mana yang LEBIH TEPAT

Variasi pendekatan dan teori-teori yang ditulis dalam buku ini mungkin telah menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pembaca tentang pendekatan dan teori apa yang paling tepat untuk memahami, melihat, menganalisis dan meramalkan suatu pembuatan kebijakan LN di suatu negara. Jawaban sederhana, tentu saja, tidak ada teori yang paling unggul dan tepat. Setiap pendekatan dan teori mempunyai keuntungan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan karena itu penggunaan dan penerapannya pun sangat bergantung pada konteks dan kasus yang sedang dikaji.

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana memilih pendekatan dan teori-teori di bab-bab sebelum ini secara lebih tepat. Karena penggunaannya secara sporadis bukannya akan membantu menganalisis tetapi malah akan membingungkan. Penggabungan antarpendekatan dan teori-teori secara ambisius juga akan menghasilkan analisis yang kacau dan tidak logis. Setiap pendekatan, perspektif dan teori memiliki sudut pandang sendiri dan pilihan data sendiri atau, dengan kata lain, mempunyai persepsi sendiri tentang data atau pengetahuan apa yang diperlukan dan yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E. (2002). Constructivism and International Relations. In W. Carlsnaes, B. A. Simmons & T. Risse-Kappen (Eds.), *Handbook of international relations* (pp. xx, 571 p.). London: SAGE.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis* ([18th print.] ed.). Boston [Mass.]: Little, Brown.
- Art, R. J., & Waltz, K. N. (1983). *The Use of Force : international politics and foreign policy* (2nd ed. ed.). Lanham, London: University Press of America.
- Ayip, Zainuddin. 2007. "Bersama Diplomat: Indonesia manahu perbetul tanggapan", *Berita Harian*, 15 November 2007
- Beitz, C. R. (1979). *Political theory and international relations*. Princeton, Guildford: Princeton University Press.
- Braybrooke, D., & Lindblom, C. E. (1963). *A strategy of decision: policy evaluation as a social process*: Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan.
- Brown, C. (1993). *Political restructuring in Europe: ethical perspectives*. London: Routledge.



TENTANG PENULIS

- Teori-teori Hubungan Internasional
(THI), 15-6
- Teori-teori Politik Internasional (TPI), 15
- Teori-teori Politik Luar Negeri (TPLN), 15-6, 34
- Thailand, 219
- the end of history*, 65
- the Organizational Process*, 93
- the terminus for all*, 199
- Theodore Sorensen, 98
- Thomas Risse, 130
- Thomas Risse, 149
- Tilly, 198
- Tim Dunne, 35, 49, 195-6
- Timor Timur, 58, 197
- Timur Tengah, 63
- TKI (Tenaga Kerja Indonesia), 154, 169, 174
- Tonny Blair, 195
- transnational corporations (TNCs)* 14, 69
- treaty*, 110
- Tsunami, 213
- Tun Abdul Razak, 163-4, 166
- Turki, 98, 143
- ultimate decision unit*, 108
- unnah*, 169
- UMNO, 164
- under duress*, 98
- Uni Eropa, 14, 53, 195-6
- Uni Soviet, 44-5, 49, 50-1, 60, 93-4, 97, 121, 145, 150
- unitary state*, 15; *unitary state aktor*, 100
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, 128
- Universal Declaration of Human Rights*, 67
- Universitas Jember, 8
- Upin dan Ipin, 202
- UUU Indonesia, 178
- Valerie Hudson, 15, 24-6, 79
- valuation*, 86
- van Aardt, 190
- van Naerssen, 169
- Vietnam, 107, 111
- virtue*, 182
- visionary*, 57
- 'vision of serumpun', 166
- Volker Heins, 181, 186
- W. C. Wohlforth, 35-6, 53
- Wallace 163
- Walter Carlisnaes, 13-4
- Walter Lippmann, 191
- war of all against all*, 126
- Wendt, 22-3, 124-7, 129, 132, 145, 150, 155-6, 160-2, 165, 175
- what states make of it*, 122
- William of Orange, 48
- wishful thinking*, 106
- Woodbridge, 69
- World Bank, 69
- world state*, 208
- WTO, 69, 218
- Yohanes Sulaiman, 201
- Yordania, 110
- Yuyun Rahim, 8
- Zain, 163
- Zambia, 110
- Zehfuss, 122
- zero sum game*, 64

ABUBAKAR EBY HARA, PhD. lahir di Pangkal Pinang-Indonesia, 8 Februari 1964. Meskipun saat ini masih tercatat sebagai Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fisip Universitas Jember, Jawa Timur, ia juga harus bolak-balik Malaysia-Indonesia karena ia adalah Senior Lecturer di Fakultas Pengkajian Antarabangsa (College of Law, Government and International Studies - COLGIS, Universitas Utara Malaysia sejak 2007 hingga sekarang. Ia pernah menjadi Visiting Research Fellow pada Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Universitas Kyoto, Jepang, pada Mei-Oktober 2006. Antara tahun 2003-2006 ia adalah Program Officer pada the International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta dan sekaligus menjadi dosen tamu (Guest Lecturer) di Department of International Relations, Universitas Paramadina Mulya Jakarta, Universitas Al-Azhar Jakarta dan Universitas Indonesia Jakarta (2001-2005).

Profesi mengajar, menulis, dan meneliti ia mulai setelah lulus (BA-Drs) dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 1987. Pada 1995 ia mendapat gelar Master of Arts (MA) di Department of International Relations,

Research School Pacific and Asian Studies (RSPAS), Australian National University (ANU), Canberra, Australia; kemudian di situ juga ia meraih gelar Doktor (Ph.D.) pada tahun 2000.

Ia merupakan dosen yang produktif dalam melakukan penelitian. Tulisan (opini)-nya berkebar di berbagai koran nasional; hasil penelitiannya diterbitkan di berbagai jurnal tingkat nasional dan internasional. Dia juga merupakan pembicara di forum-forum internasional. Email: ebyhara@gmail.com. []

